

**Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Komisaris Independen,
Kualitas Audit, dan Ukuran Perusahaan pada Tax Avoidance**

Dhea Azella Cahyani¹, Faizal Satria Desitama²

^{1,2}Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
azelladheaa@gmail.com, faizalsatria6@uinsatu.ac.id

ABSTRACT

The phenomenon of Panama paper case involving Indonesian companies prove the existence of tax avoidance practices. This study aims to determine the effect of institutional ownership, audit committee, independent commissioner, audit quality, and company size on tax avoidance. The energy, property & real estate, and infrastructure sectors that are listed on the IDX in 2018-2022 make up the study's population. 168 samples were selected for this study based on sample criteria. In this study, the technique of data analysis employed was multiple linear regression analysis. This study shows that institutional ownership, audit committee and audit quality have a positive effect on tax avoidance, and company size has a negative effect on tax avoidance. The adjusted R Square value is 21 percent, the remaining 79 percent is explained by other variables.

Keywords: Institutional Ownership; Audit Committee; Independent Commissioner; Audit Quality; Company Size; Tax Avoidance.

ABSTRAK

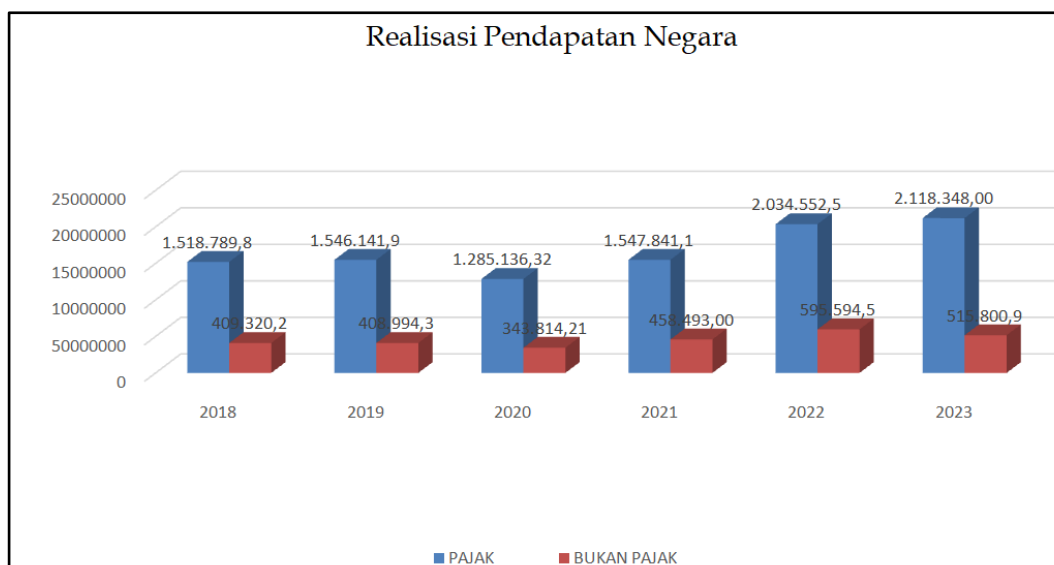
Fenomena kasus panama paper yang melibatkan perusahaan Indonesia membuktikan adanya praktik penghindaran pajak. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, komite audit, komisaris independen, kualitas audit, dan ukuran perusahaan pada penghindaran pajak. Sektor energi, sektor property & real estate dan sektor infrastruktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022 menjadi populasi dalam penelitian ini. Sebanyak 168 sampel dipilih untuk penelitian ini berdasarkan kriteria sampel. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, komite audit, dan kualitas audit berpengaruh positif pada penghindaran pajak, dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif pada penghindaran pajak, sedangkan komisaris independen tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. Nilai R Square sebesar 21 persen, sisanya 79 persen dijelaskan oleh variabel lain.

Kata kunci: Kepemilikan Institusional; Komite Audit; Komisaris Independen; Kualitas Audit; Ukuran Perusahaan; Tax Avoidance.

PENDAHULUAN

Sektor perpajakan memberikan sebagian besar pendapatan negara. Untuk menjaga tingkat pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional, semua wajib pajak diwajibkan membayar pajak. Berbeda halnya dengan perusahaan, pajak menjadi beban bagi perusahaan karena dapat mengurangi laba bersih perusahaan. Akibatnya, banyak perusahaan yang berusaha menurunkan pajak baik secara legal maupun illegal untuk mendapatkan keuntungan yang ditetapkan sebelumnya (Widnyana et al., 2021).

Realisasi pendapatan negara menunjukkan bahwa sektor pajak adalah sektor yang menerima pendapatan terbesar, menurut data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Gambar 1 menunjukkan bagaimana pandemi covid-19 menurunkan realisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan pada tahun 2020, namun pada tahun 2021-2023 realisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan meningkat.



Gambar 1. Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2018-2022

Sumber: <https://www.bps.go.id/>

Sektor pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara, karena itu perusahaan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena hal tersebut dapat membebani perusahaan dan menurunkan pendapatan perusahaan. Perusahaan dapat secara legal menurunkan kewajiban pajak mereka dengan beberapa cara, salah satunya melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Sari & Marsono, 2020). *Tax avoidance* merupakan salah satu cara yang digunakan oleh wajib pajak untuk menghindari pajak sesuai dengan peraturan undang-undang yang tidak melanggar peraturan perpajakan.

Fenomena penghindaran pajak pada kasus *Panama Papers* terjadi kebocoran dokumen yang bersifat rahasia yang berisi data tentang transaksi keuangan para miliarder dan orang populer di luar negeri. Di dalam dokumen tersebut mencakup nama-nama klien besar dunia yang diduga menginginkan uang mereka disembunyikan untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Sejumlah perusahaan dari Indonesia yang telah diidentifikasi salah satunya PT. Ciputra Development, Tbk sebuah perusahaan *property & real estate* yang melakukan penghindaran pajak dengan menyembunyikan kekayaan hingga USD 1,6 miliar atau setara dengan Rp 21,6 triliun yang bertujuan untuk menghindari pajak negara (Sudiarta, 2016).

Tata kelola perusahaan atau *good corporate governace* dalam suatu perusahaan sangat diperlukan untuk mengurangi atau meminimalisir praktik *tax avoidance*. Tata kelola perusahaan yang juga dapat dikatakan sebagai sistem yang mengatur atau mengendalikan perusahaan, didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hak-hak dan kewajiban pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya. Perusahaan yang menerapkan tata kelola perusahaan yang baik akan lebih mampu mengendalikan risiko, meningkatkan

kinerja, tetap kompetitif, dan beroperasi dengan lebih efisien (Mahulae et al., 2016). Penerapan tata kelola perusahaan dalam penelitian ini meliputi kepemilikan institusional, komite audit, komisaris independen, kualitas audit dan ukuran perusahaan.

Kepemilikan institusional dapat diartikan sebagai suatu kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi yang biasanya dianggap sebagai pihak yang memonitor perusahaan (Dewi, 2019). Mengawasi kinerja manajemen yang lebih optimal merupakan salah satu peran utama kepemilikan institusional. Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional, semakin besar pula tingkat pengawasan kepada manajerial sehingga konflik kepentingan dapat berkurang yang akhirnya investor institusional menurunkan biaya hutang dengan meminimalkan masalah keagenan, sehingga peluang terjadinya *tax avoidance* dapat berkurang (Fadhilah, 2014).

Faktor lainnya dari tata kelola perusahaan adalah komite audit. Kemampuan dewan komisaris untuk mengawasi manajemen selama proses penyusunan laporan keuangan dapat dibantu dengan adanya komite audit dalam perusahaan. Fungsi lain dari komite audit adalah mengendalikannya para manajer untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan dalam situasi dimana para manajer akan berusaha meminimalkan kewajiban pajak mereka. Hal tersebutlah yang memberikan komite audit wewenang untuk menghentikan tindakan yang menyimpang terkait dengan laporan keuangan perusahaan (Widnyana et al., 2021).

Komisaris independen dapat diartikan sebagai dewan komisaris yang tidak terikat dengan pemegang saham pengendali atau direktur maupun komisaris lainnya. Fungsi komisaris independen adalah untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kesetaraan. Dengan adanya komisaris independen diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mengalokasikan sumber daya untuk membuat rencana manajemen pajak yang efektif serta memberikan pengalaman dan informasi yang bermanfaat bagi perencanaan pajak (Kusufiyah & Anggraini, 2019).

Kualitas audit dapat diartikan kemungkinan-kemungkinan yang muncul saat auditor mengaudit laporan keuangan klien, menemukan pelanggaran, dan mempublikasikan temuan-temuan tersebut dalam laporan keuangan yang telah diaudit. Spesialisasi industri Kantor Akuntan Publik (KAP) dapat digunakan sebagai alat ukur ketika memilih auditor. Laporan keuangan yang diaudit langsung oleh auditor KAP spesialisasi industri dapat secara akurat mengidentifikasi kesalahan, yang menghasilkan jumlah kecurangan yang lebih rendah pada nilai perusahaan dibandingkan dengan perusahaan yang menggunakan auditor non KAP spesialisasi industri untuk mengaudit laporan keuangan (Khairunisa et al., 2017).

Ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya suatu perusahaan dan laporan keuangan untuk periode yang diaudit mencantumkan ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dapat ditentukan dengan melihat total aset yang dimiliki oleh perusahaan atau total aktiva perusahaan yang besar kecilnya perusahaan juga dapat diukur dengan melihat total penjualan, total nilai buku aset, total aktiva dan jumlah tenaga kerja. Ukuran perusahaan menggambarkan tinggi rendahnya aktivitas operasi suatu perusahaan, semakin besar perusahaan, semakin banyak aktivitas yang dilakukan

oleh perusahaan. Peningkatan total aset yang dimiliki sejalan dengan peningkatan ukuran perusahaan tersebut, dengan meningkatnya ukuran perusahaan maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengambil keuntungan dari celah-celah untuk melakukan praktik penghindaran pajak setiap transaksi (Handayani & Mildawati, 2018).

Penelitian mengenai *tax avoidance* semakin menarik untuk diteliti karena penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* telah banyak dilakukan dan hasilnya tidak sama. Fenomena pajak terus berubah, terutama di Indonesia, sehingga diperlukan informasi dan kajian terkini mengenai kondisi pajak dari waktu ke waktu. Pada penelitian ini memiliki keterbaruan yaitu pada sektor yang diteliti yaitu sektor energi, sektor *property & real estate* dan sektor infrastruktur yang relative sedikit digunakan pada penelitian sebelumnya dan penelitian ini menggunakan laporan keuangan perusahaan periode 2018-2022.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada sektor energi, sektor *property & real estate* dan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022. Data sekunder digunakan pada penelitian ini. Data sekunder penelitian ini berasal dari laporan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2018-2022, yang meliputi sektor energi, *property & real estate* dan infrastruktur yang dapat diakses melalui laman www.idx.co.id. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepemilikan Institusional (X_1), Komite Audit (X_2), Komisaris Independen (X_3), Kualitas Audit (X_4), Ukuran Perusahaan (X_5), dan *tax avoidance* (Y) pada sektor energi, sektor *property & real estate*, dan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.

Seluruh 223 perusahaan sektor energi, sektor *property & real estate*, dan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022 menjadi populasi dalam penelitian ini. Teknik sampling yang dipilih dalam penelitian ini dengan menggunakan metode *nonprobability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Sebanyak 168 sampel perusahaan dalam penelitian ini yang memenuhi kriteria sampel penelitian berasal dari sektor energi, sektor *property & real estate*, dan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022. Teknik Analisis Data Yang Digunakan Adalah Analisis Regresi Linier Berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif dalam penelitian ini menggunakan suatu karakteristik umum dari sampel yang digunakan peneliti dengan lebih rinci sehingga dapat diketahui nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata dan nilai standar deviasi dari masing-masing variabel yaitu kepemilikan institusional, komite audit, komisaris independen, kualitas audit, ukuran perusahaan dan *tax avoidance*. Tabel 1 dibawah ini menampilkan temuan-temuan dari uji statistik deskriptif untuk setiap variabel penelitian.

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepemilikan Institusional	168	0,00	1,00	0,6192	0,20093
Komite Audit Komisararis Independen	168	3	7	3,21	0,618
Kualitas Audit	168	0,25	0,67	0,3953	0,08790
Ukuran Perusahaan	168	0	1	0,30	0,459
Tax Avoidance	168	26,91	33,26	29,7855	1,41467
Valid N (listwise)	168	0,00	0,48	0,1256	0,12406

Sumber: Data Penelitian, 2024

Pada Tabel 1, menunjukkan bahwa sebaran data untuk variabel kepemilikan institusional, yang diukur dengan membagi jumlah saham pihak institusional dengan total saham yang beredar dikali 100%. Sebaran data menunjukkan nilai minimum kepemilikan institusional sebesar 0,00 terdapat pada perusahaan Pollux Investasi internasional Tbk (POLI) pada tahun 2018 dan nilai maksimum kepemilikan institusional sebesar 1,00 terdapat pada perusahaan Link Net Tbk (LINK) pada tahun 2022. Nilai rata-rata kepemilikan institusional sebesar 0,6192 dan standar deviasi kepemilikan institusional sebesar 0,20093. Sebaran data kepemilikan institusional cukup dekat karena hasil uji statistik deskriptif terdapat penyimpangan data terhadap nilai rata-rata sebesar 0,6192 dan nilai standar deviasi kepemilikan institusional lebih kecil dari nilai rata-ratanya

Sebaran data untuk variabel komite audit yang diukur dengan jumlah seluruh komite audit. Sebaran data menunjukkan nilai minimum komite audit sebesar 3 terdapat pada 155 perusahaan pada tahun 2018-2022 dan nilai maksimum komite audit sebesar 7 terdapat pada perusahaan Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) pada tahun 2020. Nilai rata-rata komite audit sebesar 3,21 dan standar deviasi komite audit sebesar 0,618. Sebaran data komite audit cukup dekat karena berdasarkan hasil uji statistik deskriptif, terdapat penyimpangan data terhadap rata-rata sebesar 3,21 dan nilai standar deviasi komite audit lebih kecil dari nilai rata-ratanya.

Sebaran data untuk variabel komisararis independen yang diukur dengan jumlah anggota komisararis independen dibagi jumlah total anggota dewan komisararis. Sebaran data menunjukkan nilai minimum komisararis independen sebesar 0,25 terdapat pada perusahaan Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) pada tahun 2018-2022, perusahaan Perdana Gapuraprima Tbk (GPRA) pada tahun 2019 dan perusahaan Nusantara Infrastructure Tbk (META) pada tahun 2020-2021 dan nilai maksimum komisararis independen sebesar 0,67 terdapat pada perusahaan Jaya Real Property Tbk (JRPT) pada tahun 2021, perusahaan PP Propert Tbk (PPRO) pada tahun 2020 & 2022 dan perusahaan PP Presisi Tbk (PPRE) pada tahun 2021. Nilai rata-rata komisararis independen sebesar 0,3953 dan standar deviasi komisararis independen sebesar 0,08790. Sebaran data komisararis independen cukup dekat karena

berdasarkan hasil uji statistik deskriptif, terdapat penyimpangan data terhadap rata-rata sebesar 0,3953 dan nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-ratanya.

Sebaran data untuk variabel kualitas audit diukur dengan menggunakan variabel dummy 1 untuk KAP *The Big Four* dan 0 untuk KAP *Non The Big four*. Sebaran data menunjukkan nilai minimum kualitas audit sebesar 0 terdapat pada 124 perusahaan tahun 2018-2022 dan nilai maksimum kualitas audit sebesar 1 terdapat pada 54 perusahaan tahun 2018-2022. Nilai rata-rata kualitas audit sebesar 0,30 dan standar deviasi sebesar 0,459. Sebaran data kualitas audit cukup lebar, terbukti dari hasil uji statistik deskriptif menunjukkan adanya adanya penyimpangan data terhadap rata-rata sebesar 0,30 dan nilai standar deviasi kualitas audit lebih besar dari nilai rata-ratanya.

Sebaran data untuk variabel ukuran perusahaan yang diukur dengan menggunakan LN (total aset). Sebaran data menunjukkan nilai minimum ukuran perusahaan sebesar 26,91 terdapat pada perusahaan Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk (GHON) pada tahun 2018 dan nilai maksimum ukuran perusahaan sebesar 33,26 terdapat pada perusahaan Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) pada tahun 2021. Nilai rata-rata ukuran perusahaan sebesar 29,7855 dan standar deviasi sebesar 1,41467. Sebaran data ukuran perusahaan cukup dekat karena berdasarkan hasil uji statistik deskriptif, terdapat penyimpangan data terhadap nilai rata-rata sebesar 29,7855 dan nilai standar deviasi ukuran perusahaan lebih kecil dari nilai rata-ratanya.

Sebaran data untuk variabel *tax avoidance* yang diukur dengan menggunakan ETR beban pajak dibagi laba sebelum pajak. Sebaran data penghindaran pajak cukup dekat, terbukti dari hasil uji statistik deskriptif yang menunjukkan adanya penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya sebesar 0,1256 dan nilai standar deviasi *tax avoidance* lebih kecil dari nilai rata-ratanya.

Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel independen dan dependen dalam penelitian ini, maka digunakan analisis regresi linier berganda yang bertujuan untuk menguji pengaruh variabel dependen (y) terhadap dua atau lebih variabel independent (x). Sebelum melakukan uji regresi data yang dipakai dalam penelitian harus memenuhi syarat asumsi klasik. Uji asumsi klasi yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		168
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,16274225
Most Extreme Differences	Absolute	0,068
	Positive	0,068
	negative	-0,036
Test Statistic		0,068

Asymp. Sig. (2-tailed) ^c	0,054
-------------------------------------	-------

Sumber: Data Penelitian, 2024

Pada Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,054 yang dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 maka model regresi tersebut dapat dikatakan berdistribusi normal.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Model (Constant)	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Kepemilikan Institusional	0,970	1,031
Komite Audit	0,796	1,256
Komisaris Independen	0,962	1,039
Kualitas Audit	0,858	1,166
Ukuran Perusahaan	0,720	1,388

Sumber: Data Penelitian, 2024

Pada Tabel 3 menunjukkan bahwa variabel independen memiliki nilai *tolerance* diatas 0,100 dan nilai VIF kurang dari 10,00 maka dapat dikatakan model regresi bebas dari multikolinearitas atau tidak terjadi gejala multikolinearitas.

Tujuan dari uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan metode Uji *Spearman's Rho*. Uji *Spearman's Rho* dilakukan dengan cara mengkorelasi variabel independent dengan residual. Hasil uji *spearman's rho* di peroleh nilai Sig.(2-tailed) kepemilikan institusional sebesar 0,508, Sig.(2-tailed) komite audit sebesar 0,515, Sig.(2-tailed) komisaris independent sebesar 0,825, Sig.(2-tailed) kualitas audit sebesar 0,759, dan Sig.(2-tailed) ukuran perusahaan sebesar 0,956, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas karena nilai signifikansi lebih besar

Tanel 4.8 Autokorelasi

Model	Durbin-Watson
1	2,101

Sumber: Data Penelitian 2023

Pada Tabel 4 dapat dilihat bahwa nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 2,101 dengan jumlah variabel independent sebanyak 5 ($k=5$) maka dapat diperoleh nilai dl sebesar 1,6868, nilai du sebesar 1,8092 dan nilai 4-du sebesar 2,1908. Syarat tidak terjadi autokorelasi = $du < dw < 4-du$ yaitu $1,8092 < 2,101 < 2,1908$ maka dapat dikatakan model regresi bebas dari autokorelasi atau tidak terjadi gejala autokorelasi.

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,096	0,592		1,849	0,066
	Kepemilikan Institusional	0,430	0,075	0,400	5,745	0,000
	Komite Audit	0,202	0,095	0,164	2,136	0,034
	Komisaris Independen	0,210	0,190	0,077	1,105	0,271
	Kualitas Audit	0,109	0,030	0,267	3,607	0,000
	Ukuran Perusahaan	-0,288	0,116	-0,200	-2,479	0,014

Sumber: Data Penelitian, 2024

Berdasarkan hasil analisis regresi yang dapat dilihat pada Tabel 5 maka persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini ditulis sebagai berikut.

$$Y = 1,096 + 0,430X_1 + 0,202X_2 + 0,210X_3 + 0,109X_4 - 0,288X_5 + \epsilon$$

Nilai konstanta (α) sebesar 1,096, artinya apabila variabel kepemilikan institusional, komite audit, komisaris independen, kualitas audit dan ukuran perusahaan bernilai 0 maka besarnya tingkat *tax avoidance* sebesar 1,096. Nilai koefisien regresi (β_1) sebesar 0,430 berarti apabila kepemilikan institusional (X_1) naik 1 persen, maka nilai CETR (Y) akan naik sebesar 0,430 satuan dengan syarat variabel independen lainnya konstan. Nilai koefisien regresi (β_2) sebesar 0,202 berarti apabila komite audit (X_2) naik 1 persen, maka nilai CETR (Y) akan naik sebesar 0,202 satuan dengan syarat variabel independen lainnya konstan. Nilai koefisien regresi (β_3) sebesar 0,210 berarti apabila komisaris independen (X_3) naik 1 persen, maka nilai CETR (Y) akan naik sebesar 0,210 satuan dengan syarat variabel independen lainnya konstan. Nilai koefisien regresi (β_4) sebesar 0,109 berarti apabila kualitas audit (X_4) naik 1 persen, maka nilai CETR (Y) akan naik sebesar 0,109 satuan dengan syarat variabel independen lainnya konstan. Nilai koefisien regresi (β_5) sebesar -0,288 berarti apabila ukuran perusahaan (X_5) naik 1 persen, maka nilai CETR (Y) akan turun sebesar 0,288 satuan dengan syarat variabel independen lainnya konstan.

Tabel 6. Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.486	0,236	0,213	0,16523

Sumber: Data Penelitian, 2023

Tabel 6 menampilkan temuan hasil koefisien determinasi, yang menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,213. Nilai *Adjusted R Square* dapat diartikan

variabel *tax avoidance* dapat dijelaskan oleh variabel kepemilikan institusional, komite audit, komisaris independent, kualitas audit dan ukuran perusahaan sebesar 21 persen, sisanya 79 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar model regresi. Nilai *Standar Error of the Estimate* sebesar 0,16523 artinya semakin kecil nilai *Standar Error of the Estimate* maka model regresi akan tepat dalam memprediksi variabel independen.

Tabel 7. Hasil Uji Kelayakan Model

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,370	5	0,274	10,033	0,000
	Residual	4,423	162	0,027		
	total	5,793	167			

Sumber: Data Penelitian, 2024

Model regresi dianggap layak untuk digunakan dalam penelitian ini berdasarkan hasil uji kelayakan model yang ditunjukkan pada tabel 7, yang menunjukkan bahwa hasil perhitungan F sebesar 10,033 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut berarti bahwa variabel independen berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen.

Tabel 8. Hasil Uji Hipotesis

Mode l		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,096	0,592		1,849	0,066
	Kepemilikan Institusional	0,430	0,075	0,400	5,745	0,000
	Komite Audit	0,202	0,095	0,164	2,136	0,034
	Komisaris Independen	0,210	0,190	0,077	1,105	0,271
	Kualitas Audit	0,109	0,030	0,267	3,607	0,000
	Ukuran Perusahaan	-0,288	0,116	-0,200	-2,479	0,014

Sumber: Data Penelitian, 2024

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada Tabel 8, dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien variabel kepemilikan institusional positif sebesar 0,430 dengan nilai t hitung sebesar 5,745 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan pada *tax avoidance*. Hasil penelitian ini didukung oleh

Ningrum, (2021), Tarmizi et al., (2023), Ngadiman & Puspitasari, (2014) dan Fauzan et al., (2021) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Semakin tinggi nilai kepemilikan institusional maka semakin tinggi pula beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Hal tersebut memungkinkan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan semakin kecil maka, hipotesis pertama (H_1) dalam penelitian ini diterima. Kepemilikan institusional dalam perusahaan diperlukan agar dapat memantau aktivitas manajemen perusahaan dalam melakukan pengelolaan perpajakan. Semakin besar kepemilikan institusional dan hak suara yang dimiliki dapat meningkatkan kontrol terhadap manajemen perusahaan agar dapat mematuhi peraturan perpajakan, sehingga dapat dikatakan bahwa keberadaan kepemilikan institusional dapat mengurangi praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan.

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada Tabel 8, dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien variabel komite audit positif sebesar 0,202 dengan nilai t hitung sebesar 2,136 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,034 lebih kecil dari 0,05. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa variabel komite audit berpengaruh positif signifikan pada *tax avoidance* maka hipotesis kedua (H_2) yang menyatakan komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* diterima. Hasil penelitian ini didukung oleh Tandean & Winnie, (2016), Fadhilah, (2014), waluyo, (2017) dan F. J. Pamungkas & Fachrurrozie, (2021) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif pada *tax avoidance*.

Komite audit beranggotakan paling sedikit 3 orang. Jika anggota komite audit beranggotakan kurang dari 3 orang, maka dapat meningkatkan tindakan manajemen dalam meminimalkan pendapatan untuk keperluan perpajakan. Semakin banyak jumlah komite audit dalam perusahaan, maka pengendalian kebijakan dalam bidang keuangan akan lebih ketat sehingga semakin sulit melakukan praktik penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada Tabel 8, dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien variabel komisaris independen positif sebesar 0,210 dengan nilai t hitung sebesar 1,105 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,271 lebih besar dari 0,05. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* maka hipotesis ketiga (H_3) yang menyatakan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ansar et al., (2021), (Palupi et al., 2020), (Merslythalia & Lasmana, 2016), dan Ardiansyah & Zulaihati, (2022) yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Komisaris independen berfungsi sebagai pihak yang membantu dalam meminimalisir praktik *tax avoidance* yang terjadi di perusahaan. Tanggungjawab komisaris independen yang utama adalah mendorong penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam perusahaan melalui dewan komisaris yang memungkinkan untuk menjalankan fungsi pengawasan serta dapat memberikan nasihat kepada direksi secara efektif serta dapat memberikan nilai tambah bagi

perusahaan. Asumsi tersebut tidak sesuai dengan hasil analisis yang menyatakan bahwa komisaris independent tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, maka dapat dikatakan bahwa besar kecilnya jumlah komisaris independen yang ada dalam perusahaan tidak menjamin bahwa perusahaan dapat terbebas dari praktik *tax avoidance*. Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan tidak efektif dalam usaha mencegah praktik *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada Tabel 8, dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien variabel kualitas audit positif sebesar 0,109 dengan nilai t hitung sebesar 3,607 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh positif signifikan pada *tax avoidance* maka hipotesis ke empat (H_4) yang menyatakan kualitas audit berpengaruh positif pada *tax avoidance* diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Oktaviana & Kholis, 2021), Mais & Patmaningsih, (2017), Oktaviana & Kholis, (2021), dan waluyo, (2017) yang menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh signifikan positif pada *tax avoidance*.

Perusahaan yang pelaporan keuangan diaudit oleh KAP *the big four* akan mendapat kepercayaan lebih karena KAP *the big four* memiliki reputasi yang baik dalam pengauditan laporan keuangan. Laporan keuangan yang di audit oleh KAP *the big four* diyakini lebih berkualitas karena menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya sehingga praktik penghindaran pajak dapat berkurang.

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada Tabel 8, dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien variabel ukuran perusahaan negatif sebesar 0,288 dengan nilai t hitung sebesar negatif 2,479 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,014 lebih kecil dari 0,05. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan pada *tax avoidance* maka hipotesis kelima (H_5) yang menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance* diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulyati et al., (2019), Fauzan et al., (2021), Ngadiman & Puspitasari, (2014), dan Sidauruk & Putri, (2022) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif pada *tax avoidance*. Perusahaan yang memiliki total aset yang besar cenderung mampu menghasilkan keuntungan dan membayar kewajibannya dalam pembayaran pajak dibandingkan perusahaan yang memiliki total aset kecil. Perusahaan besar cenderung akan melakukan pemilihan metode akuntansi yang menanggungkan laba yang dilaporkan untuk memperkecil laba yang dilaporkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa variabel kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan institusional pada perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja manajemen yang optimal, semakin banyak kepemilikan institusional, maka semakin kecil praktik penghindaran pajak yang dilakukan. Saran yang dapat diberikan kepada perusahaan berdasarkan hasil dari penelitian dan simpulan adalah memperhatikan kinerja kepemilikan institusional, hal ini dikarenakan jika kepemilikan institusional ikut serta dalam pengawasan kinerja

manajemen perusahaan, maka praktik penghindaran pajak yang dilakukan semakin kecil.

Variabel komite audit berpengaruh positif pada *tax avoidance*. Semakin banyak jumlah komite audit dalam perusahaan, maka pengendalian kebijakan dalam bidang keuangan akan lebih ketat sehingga semakin sulit melakukan praktik penghindaran pajak. Saran yang dapat diberikan pada perusahaan adalah meningkatkan kinerja komite audit dalam mengawasi manajemen sehingga tindakan kecurangan manajemen dalam melakukan praktik penghindaran pajak semakin berkurang.

Variabel komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, hal tersebut menunjukkan bahwa besar kecilnya jumlah komisaris independen yang ada dalam perusahaan tidak menjamin bahwa perusahaan dapat terbebas dari praktik penghindaran pajak. Saran yang dapat diberikan kepada perusahaan seharusnya komisaris independen menunjukkan independensinya agar fungsi pengawasan terhadap kinerja manajemen dapat berjalan dengan baik. maka pihak perusahaan harus meningkatkan komisaris independent yang ada dalam perusahaan agar pengawasan terhadap kinerja manajemen berjalan secara optimal dan penghindaran pajak yang dilakukan akan semakin berkurang.

Variabel kualitas audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* hal tersebut berarti perusahaan yang pelaporan keuangan diaudit oleh KAP *the big four* akan mendapat kepercayaan lebih karena KAP *the big four* memiliki reputasi yang baik dalam pengauditan laporan keuangan. Saran bagi pihak perusahaan adalah dalam pengauditan laporan keuangan agar menggunakan KAP *the big four* karena bisa mendeteksi kesalahan secara tepat yang membuat nilai perusahaan dapat memiliki kecurangan yang rendah, sehingga dapat meminimalisir praktik penghindara pajak yang terjadi dalam perusahaan.

Variabel ukuran perusahaan berpengaruh negatif pada *tax avoidance*. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar pengawasan yang diberikan kepada perusahaan oleh pemerintah, sehingga perusahaan akan sebisa mungkin untuk mengurangi praktik penghindaran pajak. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar dapat menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi tindakan *tax avoidance*, dan dapat menggunakan sektor lain yang ada di Bursa Efek Indonesia (BEI).

DAFTAR PUSTAKA

- Ansar, E. N. N. A., Andriyanto, W. A., & Wibawaningsih, E. J. (2021). The effect of executive share ownership, executive compensation, and independent Commissioners on tax avoidance. *Journal of Finance and Accounting*, 9(2), 28–35.
- Antari, N. W. D., & Setiawan, P. E. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Komite Audit pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(10), 2591–2603.
- Ardiansyah, M. N., & Zulaihati, S. (2022). The Effect Of Independent Commissioners, Company Size And Profitability On Tax Avoidance In Companies Listed In The

- Idx80 Index Of The Indonesia Stock Exchange. *Jurnal Pendidikan Ekonomi, Perkantoran, Dan Akuntansi*, 3(3), 228–238.
- Ardianti, P. N. H. (2019). Profitabilitas, leverage, dan komite audit pada tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(3), 2020–2040.
- Arianandini, P. W., & Ramantha, I. W. (2018). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan kepemilikan institusional pada tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 22(3), 2090.
- Dewi, N. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *Maksimum*, 9(1), 40–51.
- Dewi, S. L., & Oktaviani, R. M. (2021). Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Komisaris Independen Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Akurasi: Journal of Accounting and Finance Studies*, 4(2), 179–194.
- Dewinta, I. A. R., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, leverage, dan pertumbuhan penjualan terhadap tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1584–1613.
- Fadhilah, R. (2014). Pengaruh good corporate governance terhadap tax avoidance (Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2009-2011). *Jurnal Akuntansi*, 2(1), 3.
- Fauzan, F., Arsanti, P. M. D., & Fatchan, I. N. (2021). The Effect of Financial Distress, Good Corporate Governance, and Institutional Ownership on Tax Avoidance. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 6(2), 154–165.
- Handayani, M. F., & Mildawati, T. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 7(2), 3.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Khairunisa, K., Hapsari, D. W., & Aminah, W. (2017). Kualitas audit, corporate social responsibility, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 9(1), 40.
- Kusufiyah, Y. V., & Anggraini, D. (2019). Peran komisaris independen, ukuran perusahaan, kinerja keuangan dan leverage terhadap usaha penghindaran pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(2), 1603–1604.
- Mahulae, E. E., Pratomo, D., & Nurbaiti, A. (2016). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial Dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance (studi Pada Perusahaan Otomotif Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014). *EProceedings of Management*, 3(2).
- Mais, R. G., & Patmaningsih, D. (2017). Effect of good corporate governance on tax avoidance of the company in listed of the Indonesia Stock Exchange (BEI).

Jurnal STEI Ekonomi, 26(02), 230–243.

- Martha, I., & Jati, I. K. (2021). Kepemilikan Manajerial, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi, 31(9)*, 2265.
- Merslythalia, D. R., & Lasmana, M. S. (2016). Effect of Competence Executive, Company Size, Independent Commissioner, and Institutional Ownership Against Tax Avoidance (Empirical Study Manufacturing Companies Listed on Bei Years 2012-2014). *Scientific Journal of Accounting and Business, 11(2)*.
- Mulyati, Y., Subing, H. J. T., Fathonah, A. N., & Prameela, A. (2019). Effect of profitability, leverage and company size on tax avoidance. *International Journal of Innovation, Creativity and Change, 6(8)*, 26–35.
- Ngadiman, N., & Puspitasari, C. (2014). Pengaruh leverage, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2010-2012. *Jurnal Akuntansi, 18(3)*, 413.
- Ningrum, A. C. (2021). *The effect of executive commissioners, company size, independent commissioners, and institutional ownership on tax avoidance in lq45 companies listed on the idx 2017-2019 period.*
- Oktaviana, D., & Kholis, N. (2021). Corporate Governance dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak. Bagaimana Pengaruhnya? *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi, 23(2)*, 217–228.
- Palupi, W. S., Hidayah, N., & Septyanto, T. (2020). Analysis Of The Effect Of Good Corporate Governance, Company Profitability And Risk On Tax Avoidance. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi, 19(2)*, 130–143.
- Rani, P. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Financial Distress, Komite Audit, dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 6(2)*, 221–241.
- Sari, E. D. P., & Marsono, S. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2018. *AKTUAL: Journal of Accounting And Financial, 5(1)*, 46.
- Sidauruk, T. D., & Putri, N. T. P. (2022). Pengaruh Komisaris Independen, Karakter Eksekutif, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Studi Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen, 2(1)*, 45–57.
- Sudiarta, I. W. (2016, April 12). *Panama Papers dan Praktik Penghindaran Pajak*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160412112445-79-123307/panama-papers-dan-praktik-penghindaran-pajak>
- Sunarsih, U., & Oktaviani, K. (2016). Good corporate governance in manufacturing companies tax avoidance. *Etikonomi, 15(2)*, 194863.

- Tandean, V. A., & Winnie. (2016). The effect of good corporate governance on tax avoidance: An empirical study on manufacturing companies listed in IDX period 2010-2013. *Asian Journal of Accounting Research*, 1(1), 28–38.
- Tarmizi, A., Perkasa, D. H., Meliantari, D., & Wahdiawati, S. A. (2023). The Effect of Institutional Ownership, Family Ownership, and Thin Capitalization on Tax Avoidance. *KnE Social Sciences*, 1–10.
- Tehupuring, R. R., & Rossa, E. (2016). Pengaruh Koneksi Politik dan Kualitas Audit Terhadap Praktik Penghindaran Pajak di Lembaga Perbankan Yang Terdaftar di Pasar Modal Indonesia Periode 2012-2014. *Seminar Nasional Indocompac*.
- Ulupui, P. R. (2016). Pengaruh komite audit, proporsi komisaris independen, dan proporsi kepemilikan institusional terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(1), 702–732.
- waluyo. (2017). The effect of good corporate governance on tax avoidance: Empirical Study of The Indonesian Banking Company. *The Accounting Journal of BINANIAGA*, 02, 1–9.
- Widnyana, P. A., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode Tahun 2016-2018. *KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(4), 1260.
- Yuni, N., & Setiawan, P. E. (2019). Pengaruh Corporate Governance dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 29(1), 128–144.